

HIBRIDITAS DI INDONESIA: BEBERAPA KASUS

Aprinus Salam

Di Indonesia, hibriditas sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Sejak beberapa bangsa melakukan migrasi ke Nusantara/Indonesia. Pada masa Sriwijaya, misalnya, berdasarkan catatan, karena hubungan perdagangan dan politik (yang masih terbatas) hibriditas belum menjadi persoalan. Keberadaan warga migran/diaspora belum cukup stabil dan tidak membangun komunitas di Nusantara.

Dalam perkembangannya, intensitasnya migrasi semakin meningkat. Migran Tionghoa, Arab, dan India termasuk yang banyak mulai menetap di Nusantara. Kemudian diikuti bangsa-bangsa lain, terutama Eropa, yakni Belanda dan Inggris. Kita tahu, kemudian Belanda “menguasai” banyak daerah di Indonesia, suatu masa yang disebut masa-masa kolonial. Berdasarkan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial-budaya, hibriditas menjadi masalah.

Tidak semua kaum migran diasporik sukses beradaptasi di Indonesia. Pada abad ke-16 dan ke-17, di beberapa tempat seperti Aceh dan di beberapa kota pantai di Jawa, sudah mulai ada koloni-koloni Arab, India, dan Tionghoa. Arab (dan India), relatif lebih sukses melakukan berbagai penetrasi dan percampuran budaya. Akan tetapi, mengapa diaspora Tionghoa secara relatif hingga kini bermasalah? Saya hanya akan mempersoalkan kasus Arab dan Tionghoa.

Dalam proses yang cukup panjang, pemerintah kolonial, dan masih berbekas hingga kini, melakukan semacam hierarki sosial, dan menempatkan masyarakat migran (diaspora) sebagai masyarakat “kelas dua”. Status dan kelas sosial ini berpengaruh terhadap strategi sosial atau budaya masyarakat diaspora, bukan saja terhadap masyarakat “kelas satu”-nya, tetapi juga terhadap masyarakat “kelas tiga”.

Berdasarkan kajian Prabhu Anjali (2007), Anjali memperhitungkan variabel artikulasi dan interseksi yang mengarah pada kreol. Variabel artikulasi antara lain seperti bahasa, keyakinan agama, kuliner, ketrampilan ttt, dan cara berpakaian. Variabel interseksi seperti ras, kelas sosial, gender, dan nasionalitas. Karena perbedaan lokasi budaya, walaupun disinggung, Anjali tidak terlalu penekanan pada variabel agama, suatu hal yang cukup signifikan di Indonesia.

Hal yang perlu diperhitungkan dalam proses hibriditas adalah bukan saja bagaimana para diaspora melakukan strategi negosiasi budaya, tetapi bagaimana pula masyarakat setempat melakukan reaksi atas negosiasi.

Kasus Arab

Di beberapa tempat, terutama di kota-kota pantai utara Jawa, bahkan hingga Banyuwangi, juga di Aceh, diaspora Arab secara umum boleh dikata sukses dalam melakukan apa yang disebut sebagai kreol. Masyarakat tempatan secara relatif

tidak mempersoalkan keberadaan diaspora Arab. Hal paling penting dari proses negosiasi dan terjadinya kreol adalah peran agama. Hal itu disebabkan seperti ada “kesamaan spritual” antara agama Islam yang masuk dengan spritualitas masyarakat Nusantara. Kemudian, mayoritas orang Indonesia menjadi Islam.

Sikap negosiasi bukan hanya diperlihatkan dari diaspora Arab, tetapi juga diperlihatkan oleh masyarakat tempatan. Hal itu bisa diketahui dari kreol cara berpakaian, bahasa, hal-hal yang bersifat visual, dan sebagainya, bahkan hingga perkawinan. Karena kenyamanan itu, diaspora Arab merasakan mendapat tempat yang mungkin lebih nyaman daripada *homeland*-nya. Semangat nasionalisme bertemu dalam mayoritas nasionalisme religius (untuk tidak mengatakan nasionalisme Islami).

Dalam hierarkinya, dan dalam perkembangannya, hal itu tampak dalam beberapa karya seni sastra atau teater, masyarakat yang pernah “kelas satu”, justru seolah menjadi musuh bersama. Mimikri terjadi bukan pada tataran “pemasteran atau penertawaan, tetapi justru sebagai sosok kafir yang dimusih. Hal ini kelak membedakan dibanding diaspora Tionghoa.

Karena agama, begitu banyak ruang yang mempertemukan diaspora Arab dan masyarakat tempatan. Saking kreolnya mendarah daging, masyarakat tempatan tidak lagi menganggap Arab (dalam beberapa hal India) sebagai diaspora. Ada hal lain yang, jika dibandingkan gagalnya kreol Tionghoa, proses-proses menguatnya apa yang disebut proses syariahisasi.

Kasus Tionghoa

Diaspora Tionghoa banyak mengajarkan keterampilan hidup, seperti teknik kuliner, ukiran, silat, bahkan dalam beberapa hal seni sastra. Ada proses dan bentuk kreol di dalamnya. Akan tetapi, secara umum hibriditas kreol Tionghoa gagal di Indonesia.

Dibandingkan diaspora Arab, tidak ada ruang yang signifikan mempertemukan proses hibriditas kreol. Hal utama yang membuat sedikitnya proses hibriditas adalah “ketidaksamaan” keyakinan agama, karena masyarakat tempatan telah dengan sukses diislamkan oleh sesuatu yang berbau Arab. Ruang artikulasi kreol masih dimungkinkan misalnya pada tataran kuliner, seni sastra, perumahan atau pakaian. Sejauh tidak mengganggu “syariah” masyarakat tempatan tidak bermasalah dengan negosiasi dan hibriditas budaya dengan diaspora Tionghoa.

Pada tataran interseksi, seperti nasionalisme, diaspora Tionghoa masih gamang dan mendua. Hal ini berkaitan dengan tekanan dan “aturan negara”, yang menyebabkan diaspora Tionghoa menjadi pragmatis dan oportunistis. Strategi hibriditas yang dilakukan diaspora Tionghoa tidak lain lebih dalam konteks penyelamatan, dan sekaligus penguatan, ekonomi.

Berbagai bentuk kreol yang seharusnya dimungkinkan, karena ada sekat agama, maka bentuk-bentuk perkawinan, perbauran kelas sosial, relatif tidak cukup berkembang. Dalam seni sastra/teater misalnya, adanya mimikri tidak dalam rangka “memusuhi” masyarakat “kelas satu”, tetapi lebih sebagai pemasteran atau mengolok-olok diri sendiri.

Semacam Kesimpulan Kecil

Hibriditas di Indonesia, dengan kasus diaspora Arab dan Tionghoa, proses negosiasinya berjalan kebalikan. Di satu pihak agama berperan mengkreolkan, di lain pihak agama berperan menggagalkan proses kreol. Perlu ada strategi baru untuk mengatasi peran agama yang begitu kuat agar proses hibriditas kreol di Indonesia bisa berjalan lebih kondusif.

Pustaka

Anjali, Prabhu. 2007. *Hibridity: Limits, Trasnformations, Prospects*. New York: States University of New York Press.